

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana akibat hukum dari sebuah perceraian pada perkawinan katolik. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian mendalam terhadap aspek-aspek internal dari sistem hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perceraian pada perkawinan katolik meliputi harta benda, kewajiban terhadap mantan istri, serta hak anak tetap menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperhatikan apakah terdapat perjanjian perkawinan pada/sebelum terjadinya perkawinan tersebut dan Selain itu, segala ketentuan hukum di luar Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan berlaku secara subsidair. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut bisa diterapkan selama tidak ada pengaturan khusus mengenai hal tersebut di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ialah proses perceraian ini tidak hanya menjadi akhir dari sebuah ikatan, tetapi juga membuka pintu bagi permasalahan yuridis turunan yang kompleks seperti sengketa pembagian harta bersama, yang sering kali diperparah oleh ketiadaan perjanjian perkawinan sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak

Kata Kunci: Perkawinan Katolik, Perceraian, Akibat Hukum

ABSTRACT

The objective of this thesis is to analyze and determine the legal consequences of divorce within Catholic marriages. The research utilizes a normative juridical methodology, which involves an in-depth examination of the internal aspects of the prevailing legal system to identify and resolve existing legal issues. The results of the study indicate that the legal consequences of divorce in a Catholic marriage—including matters of assets, spousal support, and child custody rights—are primarily governed by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, with consideration given to the existence of any prenuptial or marital agreements. Moreover, any legal provisions outside the scope of Law Number 1 of 1974 apply subsidiarily, meaning they are applicable only in the absence of specific regulations on the matter within said Law. In conclusion, the divorce process not only signifies the dissolution of a marital bond but also introduces complex ancillary legal problems. A primary example is the dispute over the division of joint assets, a conflict often intensified by the lack of a marital agreement, thereby creating a potential disadvantage for one of the parties.

Keywords: *Catholic marriage, divorce, legal consequences*